

- c. Dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang luas akan menjamin keputusan yang diambil memenuhi aspirasi masyarakat menuju proses pemerintahan yang transparan dan demokratis.
- d. Menggantikan peran penyediaan layanan kepada masyarakat, dimana mereka bisa mendapatkan informasi dan layanan dengan mendatangi langsung kantor-kantor pemerintahan. Melalui *E-Government* masyarakat mempunyai pilihan akses yang lebih banyak.

4. Undang-undang tentang *E-Government*

Yang mendasari kebijakan penerapan *E-Government* pada instansi pemerintah pusat maupun daerah adalah Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang khusus mengatur tentang strategi pemerintah dalam upaya menyelenggarakan *good governance* melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan serempak secara nasional.

Dasar hukum selanjutnya terdapat pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 13 bab 54 pasal yang khusus membahas kebijakan peraturan mengenai teknologi informasi dengan menimbang bahwa kemajuan teknologi informasi cukup pesat sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dan tidak terjadi penyalahgunaan. *E-Government* merupakan salah satu sistem

pemerintahan yang berbasis teknologi informasi menjadikan UU ITE sebagai acuan dalam penerapannya baik di pemerintahan pusat maupun daerah.

Selanjutnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) 14 bab 64 pasal yang membahas keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk layanan publik untuk menciptakan transparansi. Mengingat dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Maka setiap individu berhak mengakses informasi yang memang dibutuhkan akan tetapi tidak semua informasi dapat diakses dikarenakan kepentingan negara yang dijelas dalam UU KIP. Dalam *E-Government* berisi informasi yang diperuntukkan dan dapat diakses oleh publik sehingga selain UU ITE juga UU KIP yang dijadikan sebagai landasan dalam pengaplikasian *E-Government*.

E-Government juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik maka dalam penerapannya mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam UU pelayanan publik mengatur bagaimana prinsip pemerintah yang baik dalam hal pelayanan kepada publik agar fungsi pemerintahan berjalan efisien dalam upaya penyelenggaraan *good governance*.

Dengan demikian, masa reformasi telah mengubah pola komunikasi *downward* dominan menjadi komunikasi *upward* dominan. Dalam praktiknya, komunikasi pemerintahan pada masa ini menganut *good governance* yang menekankan pada empat pilar yaitu ketanggapan (*responsiveness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan partisipasi (*participation*).

Dalam dunia komunikasi, pada masa reformasi terjadi perkembangan baru, antara lain dicabutnya Keputusan Menteri Penerangan tentang Peraturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), sehingga pengurusannya menjadi lebih mudah, terbangunnya keberanian moral dalam menyampaikan aspirasi dan koreksi meskipun kadang-kadang tidak sejalan dengan pemerintah, adanya toleransi yang tinggi dalam perbedaan pendapat, penggunaan media massa yang semakin berani dalam menyajikan fakta atau opini serta berbagai perkembangan lain yang pada akhirnya bermuara pada suatu komitmen, yaitu persatuan dan kesatuan tetap dapat dipelihara dalam dinamika yang sedang berkembang saat ini.

C. Teori Informasi Organisasi

Salah satu gagasan paling berpengaruh dalam teori komunikasi organisasi adalah pemikir Karl Weick mengenai informasi organisasi yang berada di bawah naungan pemikiran sibernetika. Sibernetika menempatkan komunikasi pada tataran terdepan dalam studi mengenai organisasi. Teori informasi organisasi

